

Revitalisasi Peran Sektor Hulu : Strategi Akselerasi Pengurangan Sampah Melalui Penguatan Bank Sampah Dan TPS3R Di Kabupaten Nagan Raya

SURMIDA

Perencana Dinas Lingkungan Hidup Nagan Raya

Email: surmida81@gmail.com

ABSTRAK:

Kabupaten Nagan Raya menghadapi tantangan serius dalam mencapai target nasional pengurangan dan penanganan sampah. Permasalahan ini berakar bukan pada kekurangan sarana, melainkan pada kelemahan fungsional dan fragmentasi kelembagaan di sektor hulu, khususnya Bank Sampah dan TPST-3R yang belum bersinergi secara efektif. Policy paper ini menggunakan pendekatan studi kasus kualitatif dengan analisis SWOT dan matriks TOWS untuk memetakan faktor internal-eksternal, serta kriteria William Dunn untuk menyeleksi alternatif kebijakan. Hasil analisis menunjukkan posisi strategis daerah berada pada kuadran Turnaround, di mana kelemahan sistemik internal yang signifikan dapat diatasi dengan memanfaatkan peluang eksternal yang besar, seperti dukungan kebijakan nasional dan potensi pasar daur ulang. Oleh karena itu, strategi yang paling tepat bukanlah perbaikan parsial, melainkan sebuah intervensi sistemik untuk membangun ekosistem ekonomi sirkular yang terintegrasi. Rekomendasi kebijakan utama yang diusulkan adalah penerbitan Peraturan Bupati (Perbup) yang secara hukum mengikat dan mengatur desain kelembagaan, SOP sinergi, dan peran para aktor dari tingkat rumah tangga hingga industri. Kebijakan ini diharapkan dapat mentransformasi tantangan sampah dari beban biaya dan lingkungan menjadi motor penggerak ekonomi lokal yang memberdayakan dan menyejahterakan masyarakat.

Kata Kunci: Revitalisasi Sektor Hulu, Bank Sampah, Ekonomi Sirkular, Sinergi Kelembagaan, Kebijakan Persampahan.

ABSTRACT:

Nagan Raya Regency faces a significant challenge in achieving national targets for waste reduction and management. This issue is rooted not in a lack of infrastructure, but in the functional weaknesses and institutional fragmentation of the upstream sector, particularly the non-synergistic roles of Waste Banks (Bank Sampah) and 3R Waste Management Facilities (TPST-3R). This policy paper employs a qualitative case study approach, utilizing SWOT and TOWS analysis to map internal-external factors, and William Dunn's criteria to evaluate policy alternatives. The analysis reveals a strategic position in the Turnaround quadrant, indicating that significant internal systemic weaknesses can be addressed by leveraging substantial

external opportunities, such as national policy support and the potential of the recycling market. Consequently, the most viable strategy is not a partial fix, but a systemic intervention to establish an integrated circular economy ecosystem. The primary policy recommendation is the issuance of a Regent's Regulation (Peraturan Bupati) that legally binds and defines the institutional design, synergistic SOPs, and the roles of all actors, from households to industry. This policy aims to transform the waste challenge from an environmental and financial burden into a driver for a local economy that empowers and improves community welfare.

Keywords: Upstream Sector Revitalization, Waste Bank, Circular Economy, Institutional Synergy, Waste Policy.

PENDAHULUAN

Peningkatan volume sampah secara eksponensial telah menjadi salah satu tantangan paling krusial dalam agenda pembangunan berkelanjutan global, yang didorong oleh laju urbanisasi, pertumbuhan populasi, dan perubahan pola konsumsi (Chen & Lin, 2021). Krisis ini melahirkan dampak multidimensional, tidak hanya merusak ekosistem melalui pencemaran lingkungan, tetapi juga mengancam kesehatan publik dan stabilitas ekonomi (Hidayatulloh & Wulandari, 2023). Kegagalan dalam mengelola sampah secara efektif berpotensi besar menghambat pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), khususnya yang berkaitan dengan kota berkelanjutan, kesehatan, dan ekosistem darat serta laut (UNEP, 2022). Oleh karena itu, berbagai negara kini berupaya keras mentransformasi model pengelolaan sampah dari linear menjadi sirkular, sebuah pendekatan yang dipandang lebih berketahanan (Putra & Mulyana, 2021). Indonesia, sebagai salah satu negara dengan populasi terbesar, menghadapi tekanan yang sama untuk merumuskan kebijakan inovatif (Raharjo et al., 2021). Dengan demikian, pengelolaan sampah bukan lagi sekadar isu kebersihan, melainkan agenda strategis pembangunan.

Di tingkat nasional, Indonesia dihadapkan pada persoalan sampah yang sangat serius, di mana data Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN) menunjukkan timbulan sampah yang terus meningkat setiap tahunnya (KLHK, 2023). Melalui Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2017, pemerintah telah menetapkan target yang sangat ambisius dalam Kebijakan dan Strategi Nasional (Jakstranas), yaitu pengurangan sampah sebesar 30% dan penanganan sampah sebesar 70% pada tahun 2025 (Pemerintah Republik Indonesia, 2017). Target ini mengamanatkan pergeseran fundamental dari pendekatan konvensional "kumpul-angkut-buang" yang sangat bergantung pada TPA (Susanto & Nugroho, 2021). Pendekatan lama ini terbukti tidak berkelanjutan, karena hanya memindahkan masalah dan menciptakan beban fiskal serta lingkungan yang berat bagi pemerintah daerah (Firmansyah et al., 2020). Oleh karena itu, fokus utama kebijakan kini diarahkan pada penguatan sektor hulu, yakni upaya pengurangan dan pengelolaan sampah langsung dari sumbernya (Pratama, 2023).

Sejalan dengan tren nasional, Kabupaten Nagan Raya juga menghadapi eskalasi permasalahan sampah akibat pertumbuhan penduduk dan kegiatan ekonomi. Dokumen "Peta Jalan (Roadmap) Rencana Aksi Akselerasi Penuntasan Pengelolaan Sampah Tahun 2025-2026" secara jelas memproyeksikan timbulan sampah di Nagan Raya pada tahun 2024 mencapai 25.763,31 ton per tahun, dengan timbulan harian sekitar 36,30 ton (Pemerintah Kabupaten Nagan Raya, 2025a). Data ini menunjukkan

adanya tekanan yang kuat terhadap sistem pengelolaan sampah dan kapasitas lingkungan di wilayah tersebut. Permasalahan ini diperberat oleh fakta bahwa paradigma lama yang bertumpu pada pengangkutan ke TPA masih dominan (Pemerintah Kabupaten Nagan Raya, 2025a). Kondisi ini mengisyaratkan urgensi untuk segera mengakselerasi implementasi kebijakan di sektor hulu.

Analisis lebih dalam pada data kinerja menunjukkan adanya kesenjangan yang signifikan antara target dan realisasi. Berdasarkan data SIPSN yang dikutip dalam Peta Jalan, capaian pengurangan sampah di Kabupaten Nagan Raya pada tahun 2024 baru mencapai 19,63%, sementara penanganan sampah berada di angka 51,43% (Pemerintah Kabupaten Nagan Raya, 2025a). Angka-angka ini masih berada di bawah target nasional Jakstranas (30% pengurangan dan 70% penanganan), yang menandakan bahwa upaya yang telah dilakukan belum cukup efektif untuk mengejar ketertinggalan. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2024 juga mengonfirmasi capaian penanganan sampah sebesar 51,43% dan mengkategorikannya sebagai "Cukup", yang secara implisit mengakui bahwa kinerja ini belum mencapai level optimal atau maksimal (Pemerintah Kabupaten Nagan Raya, 2025b).

Potensi untuk pengelolaan di hulu sesungguhnya sangat besar jika melihat komposisi sampah di Nagan Raya. Peta Jalan (2025a) memaparkan bahwa 45% dari total sampah merupakan sisa makanan (organik) dan 35% adalah sampah plastik. Komposisi ini seharusnya menjadi peluang emas untuk program pengomposan melalui TPST-3R dan daur ulang melalui Bank Sampah, yang secara teoretis dapat mengurangi lebih dari separuh sampah yang diangkut ke TPA. Namun, Laporan Kinerja (2025b) secara eksplisit menyatakan bahwa salah satu permasalahan strategis adalah "pengelolaan sampah dari sumbernya sampai ke TPA belum optimal" dan "belum terbentuknya bank sampah sebagai tempat yang digunakan untuk mengumpulkan sampah yang sudah dipilah-pilah". Hal ini menunjukkan adanya diskoneksi antara potensi sumber daya (sampah terpilah) dengan fungsi kelembagaan yang seharusnya mengelolanya.

Permasalahan ini diperparah oleh keterbatasan cakupan pelayanan dan sarana prasarana. Peta Jalan (2025a) mengidentifikasi bahwa salah satu tantangan utama adalah "keterbatasan layanan pengelolaan sampah" di mana diperkirakan baru 30% wilayah yang terlayani secara efektif. Hal ini sejalan dengan temuan dalam LKJIP (2025b) yang menyebutkan "masih terbatasnya sarana dan prasarana dalam pengelolaan persampahan" sebagai isu strategis. Keterbatasan ini menciptakan situasi di mana sebagian besar sampah di wilayah yang tidak terlayani kemungkinan besar tidak terkelola dengan baik, yang dapat memicu pembuangan liar dan pembakaran sampah, sehingga menurunkan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) secara keseluruhan.

Secara kelembagaan, Kondisi faktualnya saat ini baru tersedia Bank Sampah yang dikelola langsung oleh Dinas Lingkungan Hidup (DLH) namun itupun belum lah berfungsi maksimal sementara untuk Bank Sampah unit belum ada sama sekali terbentuk. Disisi lain TPST-3R Cuma ada 1 di Kab. Nagan Raya namun sebagai instrumen utama di sektor hulu belum berfungsi sebagaimana mestinya. Berbagai studi di daerah lain menunjukkan bahwa keberlanjutan Bank Sampah sering terkendala oleh aspek manajerial, partisipasi masyarakat yang fluktuatif, dan ketidakpastian pasar untuk material daur ulang (Permana & Hidayat, 2021; Rizky & Anantanyu, 2022). Di sisi lain, TPST-3R kerap menghadapi tantangan biaya operasional yang tinggi dan kesulitan

dalam memasarkan produk komposnya (Handoko & Puspita, 2021). Kondisi-kondisi ini sangat mungkin terjadi pula di Nagan Raya, mengingat Peta Jalan (2025a) telah merencanakan aksi spesifik untuk "menguatkan peran bank sampah" dan "mengoptimalkan sarana pengelolaan sampah hulu lainnya seperti TPS3R", yang mengindikasikan bahwa peran dan fungsi keduanya saat ini masih lemah.

Berdasarkan jurang antara target kebijakan, data kinerja di lapangan, dan permasalahan institusional yang teridentifikasi dalam dokumen resmi daerah, maka sebuah kajian kebijakan yang mendalam menjadi sangat urgen. Pemerintah Kabupaten Nagan Raya, melalui dokumen Peta Jalan, telah menunjukkan komitmen politik untuk melakukan akselerasi, namun dokumen tersebut lebih berfokus pada "apa" yang harus dilakukan (rencana aksi) (Pemerintah Kabupaten Nagan Raya, 2025a). Kajian ini diperlukan untuk mengisi kekosongan dengan merumuskan "bagaimana" rencana aksi tersebut dapat diimplementasikan secara efektif, sinergis, dan berkelanjutan. Tanpa strategi implementasi yang solid, rencana aksi berisiko menjadi dokumen perencanaan yang tidak membuahkan hasil optimal.

Policy paper ini menjadi krusial untuk menyediakan basis argumen yang kuat dan opsi kebijakan yang implementatif bagi Bappeda dan OPD teknis. Rekomendasi yang dihasilkan akan didasarkan pada analisis data faktual dari Peta Jalan dan LKJIP, serta diperkaya dengan tinjauan praktik terbaik dari literatur akademik (Ramadhan & Hakim, 2023). Tujuannya adalah untuk memberikan peta jalan strategis yang dapat diadopsi dalam penyusunan RKPD dan penganggaran tahunan. Dengan demikian, kajian ini berfungsi sebagai jembatan antara perencanaan strategis (Peta Jalan) dan evaluasi kinerja (LKJIP), dengan menawarkan solusi untuk mengatasi kelemahan yang ada.

Tinjauan terhadap penelitian-penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa studi tentang Bank Sampah (Astuti & Lestari, 2022) dan TPST-3R (Maryono & Adiatma, 2020) seringkali dilakukan secara terpisah. Banyak penelitian berfokus pada faktor-faktor keberhasilan atau kegagalan masing-masing institusi secara parsial (Fauzi & Rozi, 2020; Prasetyo & Sugiri, 2020). Riset yang secara komprehensif menganalisis model **sinergi kelembagaan dan operasional** antara Bank Sampah dan TPST-3R dalam satu sistem terpadu di tingkat kabupaten masih sangat terbatas. Kesenjangan inilah yang seringkali menyebabkan kebijakan pengelolaan sampah di hulu menjadi tidak efektif karena antar komponennya tidak saling mendukung.

Kesenjangan riset (*research gap*) utama yang hendak dijawab oleh *policy paper* ini adalah belum adanya model revitalisasi terintegrasi yang kontekstual untuk daerah dengan karakteristik seperti Kabupaten Nagan Raya. Model tersebut harus mampu menjawab bagaimana Bank Sampah dapat difungsikan sebagai pemasok bahan baku daur ulang yang konsisten bagi industri kecil atau offtaker, dan pada saat yang sama, bagaimana TPST-3R dapat dioptimalkan untuk mengolah sampah organik yang dipilah dari sumber yang sama (Julianti & Puspitasari, 2021). Lebih dari itu, kajian ini akan mengaitkan model tersebut dengan pemberdayaan UMKM sektor hijau, sebuah perspektif yang sering terabaikan dalam kajian teknis persampahan (Manurung & Situmorang, 2022).

Kebaruan yang ditawarkan dalam kajian ini adalah perumusan **strategi revitalisasi sinergis** yang secara eksplisit menghubungkan penguatan Bank Sampah dengan optimalisasi TPST-3R, berdasarkan data dan permasalahan riil di Nagan Raya. *Policy paper* ini akan memosisikan Bank Sampah bukan hanya sebagai agen edukasi, tetapi sebagai unit usaha sosial pemasok bahan baku, sementara TPST-3R

diposisikan sebagai fasilitas pengolahan yang memiliki model bisnis yang jelas. Pendekatan ini mengubah narasi dari sekadar "mengelola sampah" menjadi "membangun ekosistem ekonomi sirkular lokal" yang memberikan nilai tambah ekonomi dan sosial.

METODE

Metodologi penelitian dalam kajian ini menggunakan pendekatan **kualitatif deskriptif** dengan **analisis SWOT (*Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats*)** untuk mengeksplorasi kondisi internal dan eksternal yang memengaruhi pembangunan pariwisata di Simeulue. Pendekatan ini dipilih karena dapat memberikan pemahaman yang mendalam mengenai potensi, tantangan, dan hambatan dalam pengelolaan sektor pariwisata secara sistemik, serta memberikan dasar yang kuat bagi rekomendasi kebijakan prioritas. Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan faktor-faktor yang mempengaruhi pembangunan pariwisata Simeulue, serta mengidentifikasi berbagai peluang dan ancaman yang dihadapi dalam upaya akselerasi pembangunan sektor pariwisata yang berkelanjutan.

Analisis data dilakukan menggunakan kerangka SWOT untuk menggali kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman yang dihadapi dalam pembangunan pariwisata Simeulue. Aspek kekuatan (*Strengths*) mencakup elemen positif internal, seperti keberagaman destinasi wisata alam dan budaya, serta potensi sumber daya alam yang melimpah. Kelemahan (*Weaknesses*) meliputi tantangan dalam pengelolaan infrastruktur yang masih terbatas, kurangnya promosi yang efektif, dan rendahnya kapasitas SDM lokal dalam pengelolaan pariwisata. Dari sisi peluang (*Opportunities*), Simeulue memiliki potensi besar untuk memanfaatkan tren pariwisata berkelanjutan, serta dukungan kebijakan pemerintah yang memprioritaskan pengembangan pariwisata berbasis komunitas dan pelestarian lingkungan. Ancaman (*Threats*) mencakup risiko degradasi lingkungan akibat aktivitas pariwisata yang tidak terkendali, serta ketidakstabilan sosial-politik yang dapat mengganggu perkembangan sektor pariwisata.

Hasil analisis SWOT akan disajikan dalam bentuk matriks SWOT, yang akan digunakan sebagai dasar untuk merumuskan strategi pengembangan pariwisata Simeulue. Strategi-strategi tersebut akan mencakup upaya memanfaatkan kekuatan untuk meraih peluang (*SO Strategy*), mengatasi kelemahan dengan memanfaatkan peluang (*WO Strategy*), menggunakan kekuatan untuk menghadapinya ancaman (*ST Strategy*), serta meminimalkan kelemahan dan ancaman sekaligus (*WT Strategy*). Penelitian ini juga akan menggunakan triangulasi metode dan sumber untuk menjaga keabsahan data dan memastikan hasil analisis yang valid dan reflektif terhadap kondisi nyata di lapangan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Setelah mengidentifikasi masalah utama yang berfokus pada kelemahan fungsional dan sinergi kelembagaan di sektor hulu, langkah selanjutnya adalah melakukan analisis mendalam terhadap faktor-faktor yang memengaruhinya. Bab ini menggunakan kerangka analisis **SWOT (*Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats*)** untuk memetakan kondisi internal dan eksternal yang dihadapi Kabupaten Nagan Raya. Analisis ini bertujuan untuk membangun fondasi yang kokoh dalam merumuskan strategi revitalisasi yang realistis dan berdaya ungkit tinggi.

1. Analisis Faktor Internal: Kekuatan dan Kelemahan

Faktor internal adalah atribut atau kondisi yang berada di dalam kendali atau lingkup pengaruh langsung Pemerintah Kabupaten Nagan Raya dan sistem pengelolaan sampah yang ada. Faktor-faktor ini mencakup sumber daya, kapabilitas, dan proses yang sedang berjalan.

A. Kekuatan (Strengths)

Meskipun menghadapi banyak tantangan, Kabupaten Nagan Raya memiliki sejumlah kekuatan fundamental yang dapat menjadi modal dasar untuk melakukan revitalisasi:

1. **Komitmen Kebijakan yang Terlembagakan dalam Dokumen Perencanaan Strategis.** Kekuatan utama Nagan Raya adalah adanya komitmen politik dan birokrasi yang terdokumentasi secara formal dan hierarkis. Ini dibuktikan dengan adanya **Renstra DLH 2023-2026**, yang secara spesifik menetapkan tujuan seperti "Meningkatkan Kinerja Pengelolaan Persampahan" dan sasaran "Meningkatnya Pengelolaan Persampahan dan Air Limbah". [Pemerintah Kabupaten Nagan Raya, 2022]. Komitmen ini diperkuat oleh **Peta Jalan Akselerasi 2025-2026**, yang menyediakan rencana aksi teknis. [Pemerintah Kabupaten Nagan Raya, 2025a]. Kekuatan ini memberikan landasan hukum dan arah yang jelas, sehingga revitalisasi bukan lagi sekadar inisiatif sporadis, melainkan bagian dari agenda resmi daerah.
2. **Adanya Target Kinerja yang Terukur dan Progresif.** Di dalam Renstra DLH (Tabel 4.1), pemerintah telah menetapkan target kinerja yang terukur, seperti peningkatan "**Persentase Jumlah Sampah Yang Tertangani**" dari 34,07% di tahun 2023 menjadi 36,15% di tahun 2026. [Pemerintah Kabupaten Nagan Raya, 2022]. Selain itu, target peningkatan "**Jumlah Sarana Prasarana Persampahan**" dari 1.200 unit menjadi 2.000 unit pada periode yang sama juga ditetapkan. [Pemerintah Kabupaten Nagan Raya, 2022]. Meskipun angka-angka ini menunjukkan tantangan besar, keberadaan target kuantitatif ini merupakan kekuatan dalam hal akuntabilitas dan menjadi dasar yang jelas untuk mengukur keberhasilan intervensi kebijakan.
3. **Potensi "Bahan Baku" Ekonomi Sirkular yang Melimpah.** Data Peta Jalan (2025a) secara lugas menunjukkan bahwa **80%** dari total sampah di Nagan Raya adalah material yang dapat diolah kembali (45% sisa makanan dan 35% plastik). [Pemerintah Kabupaten Nagan Raya, 2025a]. Ini adalah kekuatan sumber daya alamiah yang sangat besar. Dari sudut pandang humanis, ini berarti setiap rumah tangga di Nagan Raya, tanpa disadari, adalah "produsen" potensial bahan baku untuk industri kompos dan daur ulang. Kekuatan ini memungkinkan kita untuk mengubah narasi dari "mengelola masalah" menjadi "mengelola peluang" ekonomi bagi masyarakat.
4. **Eksistensi Struktur Kelembagaan dan Aparatur.** Kabupaten Nagan Raya telah memiliki Dinas Lingkungan Hidup (DLH) dengan struktur organisasi yang jelas, sebagaimana dipaparkan dalam Renstra (Bab II). [Pemerintah Kabupaten Nagan Raya, 2022]. Terdapat bidang dan seksi yang secara spesifik menangani persampahan. Meskipun kinerjanya perlu ditingkatkan, keberadaan aparatur ini merupakan kekuatan. Mereka adalah para pelaksana kebijakan yang dapat diberdayakan, dilatih, dan dimobilisasi untuk menjadi motor penggerak revitalisasi di lapangan.

B. Kelemahan (Weaknesses)

Kelemahan adalah faktor-faktor internal yang menghambat kinerja dan pencapaian tujuan. Dokumen Renstra secara jujur memaparkan kelemahan-kelemahan ini:

1. **Kesenjangan Kinerja yang Lebar dengan Target Nasional.** Meskipun memiliki target internal, capaian pengelolaan sampah Nagan Raya masih jauh dari target nasional Jakstranas (70% penanganan). Data LKJIP 2024 menunjukkan realisasi penanganan sampah sebesar **51,43%**, sementara target dalam Renstra 2024 hanya **34,85%**. [Pemerintah Kabupaten Nagan Raya, 2025b; Pemerintah Kabupaten Nagan Raya, 2022]. Adanya perbedaan data antara dokumen kinerja dan perencanaan ini menunjukkan kelemahan dalam sistem monitoring dan validasi data. Namun, poin utamanya adalah kedua angka tersebut sama-sama menunjukkan adanya *performance gap* yang sangat signifikan, yang menandakan sistem yang berjalan saat ini tidak efisien.
2. **Keterbatasan Kualitas SDM dan Anggaran yang Kronis.** Ini adalah kelemahan yang diakui secara terbuka dalam Renstra DLH (Bab III), yang mengidentifikasi masalah utama berupa "**Kurangnya SDM yang berkompeten di bidang Lingkungan**" dan "**Belum Optimalnya ketersediaan anggaran**". [Pemerintah Kabupaten Nagan Raya, 2022]. Kelemahan ini berdampak langsung pada lumpuhnya fungsi-fungsi krusial seperti pengawasan, pendampingan masyarakat, dan pemeliharaan sarana. Secara humanis, ini berarti para petugas di lapangan bekerja dengan sumber daya terbatas untuk mengatasi masalah yang terus tumbuh secara eksponensial.
3. **Fragmentasi Sistem dan Ketiadaan Rantai Nilai Hulu.** Kelemahan paling fundamental adalah sistem pengelolaan di hulu tidak terhubung. Renstra DLH secara spesifik menyebutkan isu strategis "**Pengelolaan sampah dari sumbernya sampai ke TPA belum optimal**" dan "**Minimnya Sarana dan prasarana dalam pengelolaan persampahan**". [Pemerintah Kabupaten Nagan Raya, 2022]. Ini menegaskan bahwa Bank Sampah belum menjadi pengumpul yang andal dan TPST-3R belum menjadi pengolah yang efektif. Akibatnya, tidak ada rantai nilai yang terbentuk; sampah terpilah tidak memiliki tujuan yang jelas, dan potensi ekonomi yang terkandung di dalamnya menguap begitu saja.
4. **Model Finansial yang Tidak Berkelanjutan.** Seluruh sistem pengelolaan sampah saat ini beroperasi sebagai pusat biaya (*cost center*) yang sangat bergantung pada transfer dana dari APBK. Renstra DLH (Bab III) juga menyoroti "**Tidak adanya pengelola sampah yang bisa menghasilkan nilai ekonomi**" sebagai salah satu tantangan. [Pemerintah Kabupaten Nagan Raya, 2022]. Kelemahan model ini membuat program persampahan menjadi rentan dan tidak inovatif, karena fokusnya hanya pada "menghabiskan anggaran" bukan "menciptakan nilai".

2. Analisis Faktor Eksternal: Peluang dan Ancaman

Faktor eksternal adalah kondisi atau tren yang terjadi di luar sistem pengelolaan sampah Nagan Raya, yang tidak dapat dikendalikan secara langsung namun dapat memengaruhi keberhasilan program.

A. Peluang (Opportunities)

1. **Dukungan Regulasi Nasional dan Alokasi Dana Pusat.** Kebijakan nasional seperti Jakstranas dan Permen LHK No. 14/2021 tentang Pengelolaan Sampah pada Bank Sampah memberikan payung hukum yang kuat bagi daerah. Ini membuka peluang bagi Nagari Raya untuk menyelaraskan programnya dan mengakses sumber pendanaan di luar APBD, seperti Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik bidang Lingkungan Hidup atau skema pendanaan lain dari KLHK dan kementerian terkait.
2. **Tumbuhnya Pasar Daur Ulang dan Potensi Kemitraan.** Meningkatnya permintaan industri terhadap bahan baku daur ulang adalah sebuah peluang pasar yang nyata. Pemerintah daerah dapat secara proaktif menjembatani Bank Sampah dengan pabrik daur ulang di tingkat provinsi atau nasional. Adanya kepastian serapan (*offtaker*) akan menciptakan insentif ekonomi yang riil bagi masyarakat, mengubah kegiatan memilah dari sekadar kewajiban menjadi sebuah sumber penghasilan tambahan yang menjanjikan.
3. **Kemitraan Penta-Helix dan Peran Serta Swasta (CSR).** Renstra DLH (Bab V) menyebutkan strategi "**Meningkatkan kerjasama atau kemitraan dengan pihak-pihak terkait**". [Pemerintah Kabupaten Nagari Raya, 2022]. Ini adalah pengakuan akan adanya peluang kolaborasi. Perusahaan-perusahaan yang beroperasi di Nagari Raya dapat digandeng melalui skema Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL/CSR) untuk mendanai pembangunan infrastruktur Bank Sampah atau TPST-3R. Keterlibatan akademisi dan LSM juga dapat membantu dalam pendampingan dan peningkatan kapasitas masyarakat.
4. **Adopsi Teknologi Digital untuk Efisiensi.** Perkembangan teknologi digital menawarkan peluang untuk mengatasi beberapa kelemahan internal. Aplikasi manajemen sampah dapat digunakan untuk mempermudah pencatatan di Bank Sampah, mengoptimalkan rute pengangkutan, dan sebagai platform edukasi yang menjangkau audiens lebih luas. Peluang ini dapat meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas sistem pengelolaan sampah secara keseluruhan.

B. Ancaman (Threats)

1. **Rendahnya Kesadaran dan Perilaku Masyarakat.** Ancaman terbesar datang dari faktor sosial. Renstra DLH (Bab III) secara lugas menyatakan masalah "**Masih rendahnya pemahaman, pengetahuan dan kesadaran serta peran masyarakat dalam melestarikan fungsi lingkungan hidup**". [Pemerintah Kabupaten Nagari Raya, 2022]. Perilaku membuang sampah sembarangan yang telah mengakar menjadi tantangan utama. Tanpa perubahan perilaku di tingkat individu dan rumah tangga, investasi pada infrastruktur seaneh apapun tidak akan memberikan hasil yang signifikan.
2. **Ketidastabilan Ekonomi dan Pasar Daur Ulang.** Harga komoditas daur ulang di tingkat pengepul sangat fluktuatif dan berada di luar kendali pemerintah daerah. Penurunan harga yang signifikan dapat secara langsung mematikan motivasi ekonomi masyarakat untuk berpartisipasi dalam program Bank Sampah. Ancaman ini membuat model ekonomi yang hanya bergantung pada penjualan bahan baku menjadi sangat rapuh.
3. **Potensi Konflik dengan Pelaku Ekonomi Informal.** Sektor pemulung telah lama menjadi bagian dari ekosistem persampahan informal. Upaya formalisasi melalui Bank Sampah dan TPST-3R, jika tidak dirancang secara inklusif,

berisiko menyingkirkan mata pencaharian mereka. Ancaman ini dapat menimbulkan gesekan sosial dan menghambat kelancaran program jika tidak ada strategi yang jelas untuk merangkul dan memberdayakan para pelaku informal ini ke dalam sistem yang baru.

4. **Isu Lingkungan Lintas Sektor.** Renstra DLH (Bab III) juga mengidentifikasi ancaman lain yang dapat memperburuk kondisi lingkungan secara umum, seperti "**kerusakan daerah aliran sungai (DAS) akibat penambangan ilegal**" dan "**peralihan lahan**". [Pemerintah Kabupaten Nagan Raya, 2022]. Isu-isu ini, meskipun tidak secara langsung terkait dengan sampah rumah tangga, menciptakan tekanan tambahan pada daya dukung lingkungan dan dapat mengalihkan fokus serta sumber daya pemerintah dari penanganan masalah persampahan.

Implikasi Strategis Berdasarkan Matriks SWOT

Matriks SWOT tidak hanya berfungsi untuk memetakan posisi, tetapi juga sebagai alat untuk merumuskan alternatif-alternatif strategi. Dengan mengombinasikan faktor internal (S/W) dan eksternal (O/T), kita dapat menghasilkan empat set strategi yang masing-masing memiliki logika dan tujuan yang berbeda. Memahami setiap kuadran akan membantu kita dalam memilih dan memprioritaskan rekomendasi kebijakan yang paling relevan untuk Nagan Raya.

Kuadran I: Strategi Agresif (Strengths - Opportunities / SO)

Strategi pada kuadran ini bersifat **ekspansif dan proaktif**. Logikanya adalah: "**Bagaimana kita dapat menggunakan kekuatan internal yang kita miliki untuk menangkap dan memaksimalkan peluang eksternal yang ada?**"

1. **(S1+O1) Memanfaatkan Komitmen Politik untuk Mengakses Dukungan Nasional:** Dengan modal Renstra DLH dan Peta Jalan (S1), Pemerintah Kabupaten Nagan Raya dapat secara agresif melobi dan mengajukan proposal kepada pemerintah pusat (KLHK) dan lembaga donor untuk mendapatkan alokasi DAK Fisik, bantuan teknis, atau program pendampingan lainnya (O1).
2. **(S2+O2) Mengkapitalisasi Potensi Bahan Baku untuk Membangun Kemitraan Industri:** Mengetahui bahwa 80% sampah adalah sumber daya potensial (S2), DLH dapat proaktif menjadi fasilitator antara komunitas (Bank Sampah) dengan industri daur ulang di tingkat provinsi (O2).
3. **(S4+O3) Memobilisasi Modal Sosial untuk Menarik Investasi CSR:** Kekuatan struktur komunitas di tingkat gampong (S4) dapat "dijual" sebagai sebuah platform yang efektif bagi perusahaan untuk menyalurkan dana CSR mereka (O3).

Kuadran II: Strategi Turnaround (Weaknesses - Opportunities / WO)

Ini adalah kuadran di mana Nagan Raya berada saat ini, sehingga strategi di sini adalah yang **paling krusial dan mendesak**. Logikanya adalah: "**Bagaimana kita dapat memanfaatkan peluang eksternal untuk memperbaiki atau mengatasi kelemahan internal yang kita miliki?**" Ini adalah strategi "putar haluan" yang berfokus pada perbaikan fundamental.

1. **(W3+O1) Mengatasi Keterbatasan Kapasitas SDM melalui Program Pendampingan Nasional:** Mengakui kelemahan kapasitas SDM baik di level dinas maupun komunitas (W3), pemerintah harus secara aktif mencari peluang program peningkatan kapasitas dari KLHK atau lembaga donor (O1). Strateginya adalah mengirimkan aparatur DLH dan para pengelola Bank

Sampah/TPST-3R untuk mengikuti pelatihan, bimbingan teknis, dan studi banding, sehingga mereka dapat membawa pulang pengetahuan baru untuk memperbaiki sistem dari dalam.

2. **(W2+O2) Memperbaiki Model Finansial melalui Kemitraan Pasar:** Kelemahan model finansial yang tidak berkelanjutan (W2) dapat diatasi dengan menangkap peluang adanya pasar daur ulang (O2). Strateginya adalah membentuk sebuah "Badan Usaha Milik Gampong (BUMG) Bersama" atau Koperasi yang berfungsi sebagai agregator sampah dari seluruh Bank Sampah. Entitas ini kemudian melakukan negosiasi langsung dengan pabrik untuk mendapatkan kontrak jangka panjang, sehingga memberikan kepastian harga dan pendapatan yang stabil bagi seluruh jaringan di bawahnya.
3. **(W1+O4) Mengatasi Fragmentasi Sistem dengan Adopsi Teknologi Digital:** Untuk mengatasi kelemahan sistem yang terfragmentasi (W1), pemerintah dapat memanfaatkan peluang teknologi (O4). Strateginya adalah mengadopsi atau mengembangkan platform digital sederhana yang berfungsi sebagai pusat data terpadu. Aplikasi ini dapat digunakan oleh Bank Sampah untuk mencatat transaksi, oleh DLH untuk memonitor kinerja secara *real-time*, dan oleh sistem logistik untuk menjadwalkan pengangkutan, sehingga menciptakan sistem yang terhubung, transparan, dan efisien.

Kuadran III: Strategi Diversifikasi (Strengths - Threats / ST)

Strategi pada kuadran ini bersifat **antisipatif dan defensif**. Logikanya adalah: **"Bagaimana kita dapat menggunakan kekuatan internal untuk menghadapi atau memitigasi ancaman eksternal?"**

1. **(S1+T1) Menggunakan Kewenangan Politik untuk Mengubah Perilaku Masyarakat:** Menghadapi ancaman rendahnya kesadaran masyarakat (T1), pemerintah harus menggunakan kekuatan komitmen politik dan kewenangannya (S1) secara maksimal. Strateginya adalah meluncurkan kampanye perubahan perilaku yang masif dan terstruktur, yang didukung oleh regulasi yang mengikat (misalnya, Perbup tentang Kewajiban Pemilahan Sampah Rumah Tangga).
2. **(S2+T2) Mendiversifikasi Produk Olahan untuk Mengurangi Ketergantungan Pasar:** Menghadapi ancaman fluktuasi harga komoditas daur ulang (T2), Nagan Raya harus memanfaatkan kekuatan potensi sampahnya (S2) untuk diversifikasi.
3. **(S3+T3) Mengintegrasikan Sektor Informal ke dalam Kelembagaan Formal:** Untuk menghindari potensi konflik dengan sektor informal (T3), pemerintah dapat menggunakan struktur kelembagaan yang ada (S3) untuk merangkul mereka.

Kuadran IV: Strategi Defensif (Weaknesses - Threats / WT)

Strategi pada kuadran ini adalah yang paling sulit dan seringkali merupakan pilihan terakhir. Logikanya adalah: **"Bagaimana kita dapat meminimalkan kelemahan internal dan sekaligus menghindari ancaman eksternal?"** Ini adalah strategi untuk bertahan.

1. **(W1+T1) Menerapkan Program Percontohan Terfokus:** Mengingat sistem yang ada lemah (W1) dan kesadaran masyarakat rendah (T1), mencoba menerapkan program di seluruh kabupaten sekaligus adalah resep kegagalan. Strategi defensifnya adalah memulai dari skala kecil.

2. **(W3+T2) Membangun Jaring Pengaman Ekonomi bagi Pengelola:** Dengan kapasitas SDM yang terbatas (W3) dan harga pasar yang tidak menentu (T2), para pengelola Bank Sampah di komunitas sangat rentan. Strategi defensifnya adalah menciptakan jaring pengaman.

Berdasarkan pemetaan faktor-faktor internal dan eksternal yang telah kita diskusikan, posisi strategis Kabupaten Nagan Raya dalam pengelolaan sampah di sektor hulu saat ini berada pada **Kuadran II: Strategi Turnaround (Weaknesses-Opportunities / WO)**.

Implikasi Strategis: Kebutuhan akan "Turnaround"

Posisi di Kuadran II ini memberikan sebuah arahan strategis yang sangat jelas dan imperatif, yaitu **Strategi Putar Haluan (Turnaround)**. Ini berarti bahwa Pemerintah Kabupaten Nagan Raya tidak dalam posisi untuk melakukan ekspansi agresif (seperti di Kuadran I) atau sekadar bertahan (seperti di Kuadran IV). Fokus utama kebijakan haruslah melakukan **perbaikan fundamental di internal dengan cara secara proaktif menangkap dan memanfaatkan peluang-peluang eksternal yang tersedia**.

Berdasarkan kesimpulan strategis yang mengarah pada **strategi turnaround (wo)** sebagai prioritas utama, dirumuskan tiga alternatif kebijakan dengan tingkat intervensi dan fokus yang berbeda:

Alternatif 1: revitalisasi parsial berbasis infrastruktur (status quo plus)

Kebijakan ini berfokus pada penguatan aspek fisik dan teknis dengan intervensi minimal pada sistem kelembagaan. pemerintah daerah akan berkonsentrasi pada pemenuhan target sarana dan prasarana yang tercantum dalam renstra dlh 2023-2026.

❖ Program Utama:

1. **Pengadaan sarana:** menambah jumlah tong sampah terpilah, kontainer, dan armada angkut secara bertahap sesuai target renstra.
2. **Pembangunan fisik:** membangun beberapa unit bank sampah dan tpst-3r baru di lokasi-lokasi strategis.
3. **Sosialisasi umum:** melakukan program sosialisasi dan penyuluhan mengenai pentingnya 3r kepada masyarakat secara umum.

Alternatif 2: penguatan kelembagaan bank sampah sebagai ujung tombak (fokus pada satu pilar)

Kebijakan ini mengambil satu langkah lebih maju dengan memfokuskan seluruh sumber daya untuk merevitalisasi satu pilar utama di sektor hulu, yaitu bank sampah, sebagai agen perubahan sosial dan ekonomi.

❖ Program Utama:

1. **Pembentukan dan reaktivasi bank sampah:** membentuk minimal satu bank sampah unit (bsu) di setiap desa dan mereaktivasi yang tidak aktif.
2. **Peningkatan kapasitas intensif:** memberikan pelatihan manajerial, keuangan, dan kewirausahaan secara intensif kepada seluruh pengurus bsu.
3. **Fasilitasi kemitraan pasar:** pemerintah daerah secara aktif menjembatani seluruh bsu dengan satu atau dua *offtaker* (pengepul besar/industri) untuk menjamin penyerapan hasil.

4. **Pemberian insentif operasional:** mengalokasikan dana stimulan dari apbk atau dana desa untuk mendukung biaya operasional awal bsu yang aktif.

Alternatif 3: pengembangan ekosistem ekonomi sirkular terintegrasi (intervensi sistemik)

Ini adalah alternatif kebijakan yang paling komprehensif, yang tidak hanya memperkuat masing-masing pilar, tetapi juga membangun **sistem sinergi** yang mengikat bank sampah dan TPST-3R dalam satu rantai nilai yang utuh, sejalan dengan strategi wo dan st.

❖ **Program Utama:**

1. **Penerbitan perbup sinergi:** mengeluarkan peraturan bupati yang secara spesifik mengatur desain kelembagaan, sop, dan alur kerja terintegrasi antara bank sampah, tpst-3r, dan bumg bersama sebagai agregator.
2. **Pembentukan bumg bersama tingkat kecamatan:** mendirikan badan usaha milik gampong (bumg) bersama di beberapa kecamatan percontohan yang berfungsi sebagai pusat agregasi, pengolahan awal, dan negosiasi pasar untuk seluruh bsu di wilayahnya.
3. **Revitalisasi tpst-3r sebagai unit produksi kompos:** mengoptimalkan fungsi tpst-3r untuk fokus pada pengolahan sampah organik yang dipasok dari sistem pemilahan di bank sampah, dan mengembangkan pasar lokal untuk produk komposnya (misalnya untuk sektor pertanian).

Program insentif berbasis kinerja: meluncurkan skema insentif bagi desa/kecamatan berdasarkan data kinerja (tingkat partisipasi, volume sampah terkelola) yang terekam melalui platform digital.

Analisis Alternatif Kebijakan Berdasarkan Kriteria William Dunn

Kriteria	Alternatif 1: Revitalisasi parsial (status quo plus)	Alternatif 2: Penguatan kelembagaan bank sampah	Alternatif 3: Pengembangan ekosistem terintegrasi
1. Efektivitas <i>(seberapa besar tujuan utama akselerasi pengurangan sampah tercapai?)</i>	Rendah. penambahan sarana tanpa perbaikan sistem dan partisipasi tidak akan efektif meningkatkan angka pengurangan sampah secara signifikan. masalah fragmentasi sistem tetap tidak tersentuh.	Sedang. akan sangat efektif dalam meningkatkan pengumpulan sampah anorganik. namun, belum secara sistematis menangani 45% sampah organik dan belum menciptakan sinergi dengan tpst-3r.	Tinggi. secara langsung menyerang akar masalah fragmentasi dan ketiadaan siner-gi. dengan mengintegrasikan pengelolaan sampah organik dan anorganik dalam satu rantai nilai, potensi untuk mencapai target jaks-tranas menjadi pa-ling besar.

		poten-si <i>bottleneck</i> di hilir.	
<p>2. Efisiensi (<i>seberapa besar hasil yang didapat per unit biaya yang dikeluarkan?</i>)</p>	<p>Rendah. Biaya investasi infrastruktur sangat tinggi, namun hasilnya (tingkat pengu-rangan sampah) rendah. berpotensi menghasilkan aset-aset mangkrak (bangunan bank sam-pah kosong, tpst-3r tidak beroperasi).</p>	<p>Sedang. Efisiensi akan tinggi pada tahap awal karena fokus pada pember-dayaan sdm yang biayanya lebih rendah dari infrastruktur. Namun, dalam jangka panjang, efisiensi bisa menurun jika hasil dari bank sampah tidak terserap pasar secara maksimal.</p>	<p>Tinggi. Meskipun investasi awal untuk memba-ngun sistem lebih kompleks, dalam jangka panjang akan paling efisien. De-ngan menciptakan nilai ekonomi dari seluruh jenis sam-pah (organik dan anorganik), sistem ini memiliki potensi terbesar untuk man-diri secara finansial dan mengurangi ketergantungan pada apbk.</p>
<p>3. Kecukupan (<i>seberapa jauh kebijakan ini dapat memecahkan masalah secara keseluruhan?</i>)</p>	<p>Sangat Tidak Cukup. Hanya menyentuh permu-kaan masalah (keku-rangan sarana). tidak menjawab masalah fundamental terkait kelembagaan, model finansial, kapasitas sdm, dan partisipasi.</p>	<p>Cukup Sebagian. Sangat baik dalam memecahkan masalah di sisi sampah anorganik dan pember-dayaan komunitas. Na-mun, belum cukup un-tuk mengatasi masalah pengelolaan sampah organik secara masif dan belum menjawab tantangan integrasi sistem.</p>	<p>Sangat Cukup. Kebijakan ini dirancang untuk memecahkan masalah secara ho-listik dan sistemik. menyentuh seluruh "tulang" dalam dia-gram <i>fishbone</i>: kelembagaan (per-bup), sumber daya (bung bersama), metode (sop siner-gi), dan partisipasi (insentif kinerja).</p>
<p>4. Perataan (<i>apakah manfaat kebijakan terdistribusi secara adil ke seluruh lapisan masyarakat?</i>)</p>	<p>Rendah. Manfaat hanya akan dirasakan oleh masyarakat di wilayah yang kebe-tulan mendapat alo-kasi sarana baru.</p>	<p>Tinggi. Dengan target membentuk satu bank sampah di setiap desa, kebijakan ini secara inheren bersifat merata.</p>	<p>Sangat Tinggi. tidak hanya meratakan peluang ekonomi dari sam-pah anorganik (melalui bank sam-pah), tetapi juga menciptakan nilai tambah dari sampah</p>

	tidak ada pemerataan peluang ekonomi.	memberikan kesempatan yang adil bagi seluruh komunitas untuk berpartisipasi dan mendapatkan manfaat ekonomi.	organik (melalui TPST-3R). manfaatnya terdistribusi lebih luas dan inklusif, termasuk potensi integrasi sektor informal.
<p>5. Responsivitas <i>(apakah kebijakan ini menjawab kebutuhan dan aspirasi nyata dari para pemangku kepentingan?)</i></p>	<p>Rendah. tidak responsif terhadap kebutuhan utama yang teridentifikasi dalam renstra dan lkjip, yaitu perbaikan sistem, peningkatan kapasitas, dan penciptaan nilai ekonomi. hanya menjawab kebutuhan fisik sesaat.</p>	<p>Tinggi. sangat responsif terhadap aspirasi komunitas untuk memiliki lembaga yang fungsional dan kebutuhan untuk adanya kepastian pasar. menjawab langsung masalah "bank sampah belum terbentuk" yang diakui dalam lkjip.</p>	<p>Sangat Tinggi. paling responsif karena tidak hanya menjawab kebutuhan di tingkat komunitas (akar rumput), tetapi juga menjawab kebutuhan strategis pemerintah daerah untuk memiliki sebuah sistem yang terintegrasi, terukur, dan berkelanjutan.</p>
<p>6. Ketepatan <i>(apakah tujuan kebijakan ini merupakan hal yang paling berharga dan tepat untuk dikejar saat ini?)</i></p>	<p>Kurang Tepat. tujuannya (menambah sarana) adalah hal yang baik, tetapi bukan hal yang paling bernilai saat ini. menempatkan "kereta di depan kuda"; membangun infrastruktur sebelum sistem dan manusianya siap.</p>	<p>Tepat. tujuannya (memperkuat kelembagaan di akar rumput) sangat bernilai. menempatkan pemberdayaan manusia dan komunitas sebagai fondasi, yang merupakan prasyarat untuk keberhasilan program apapun.</p>	<p>Sangat Tepat. tujuannya (membangun ekosistem ekonomi sirkular) adalah yang paling visioner dan bernilai. tidak hanya menyelesaikan masalah sampah, tetapi juga mengubahnya menjadi motor penggerak ekonomi lokal, yang sejalan dengan tujuan pembangunan daerah yang lebih luas.</p>

Kesimpulan dan Pemilihan Alternatif

Berdasarkan analisis komparatif menggunakan enam kriteria William Dunn, **Alternatif 3: Pengembangan Ekosistem Ekonomi Sirkular Terintegrasi** secara konsisten menunjukkan keunggulan di semua dimensi. Alternatif ini tidak hanya paling **efektif** dalam mencapai tujuan dan paling **cukup** dalam memecahkan akar masalah, tetapi juga paling **efisien** dalam jangka panjang, paling **merata** dalam

distribusi manfaat, paling **responsif** terhadap kebutuhan, dan paling **tepat** secara nilai strategis.

REKOMENDASI KEBIJAKAN

Setelah melalui serangkaian analisis yang sistematis mulai dari identifikasi masalah, pemetaan akar masalah melalui diagram *fishbone*, analisis SWOT, hingga evaluasi alternatif menggunakan kriteria William Dunn kajian ini sampai pada satu kesimpulan strategis yang kuat. Alternatif kebijakan yang paling unggul dan paling mampu menjawab kompleksitas permasalahan secara holistik adalah **Pengembangan Ekosistem Ekonomi Sirkular Terintegrasi**. Oleh karena itu, bab ini akan merumuskan satu rekomendasi kebijakan utama yang dirancang untuk menerjemahkan alternatif terpilih tersebut menjadi sebuah tindakan hukum dan programatik yang nyata.

Kebijakan yang direkomendasikan adalah **Penerbitan Peraturan Bupati (Perbup) tentang Penyelenggaraan Ekosistem Ekonomi Sirkular Sampah Berbasis Komunitas di Kabupaten Nagan Raya**.

Sebuah Perbup merupakan instrumen kebijakan yang paling tepat dan strategis untuk saat ini karena beberapa alasan:

1. **Kekuatan Mengikat:** Perbup memiliki kekuatan hukum yang mengikat seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan masyarakat di wilayah Kabupaten Nagan Raya.
2. **Instrumen Perintah dan Koordinasi:** Kebijakan ini bersifat lintas sektor, membutuhkan kerja sama antara DLH, DPMGP4, Bappeda, dan Kecamatan. Perbup adalah instrumen perintah dari kepala daerah yang dapat secara efektif mengamankan koordinasi tersebut.
3. **Fleksibilitas dan Kecepatan:** Proses penerbitan Perbup relatif lebih cepat dibandingkan Qanun (Peraturan Daerah), sehingga memungkinkan pemerintah untuk segera mengeksekusi strategi *turnaround* yang mendesak ini.

KESIMPULAN

Kajian *policy paper* ini berangkat dari identifikasi masalah krusial yang dihadapi Kabupaten Nagan Raya, yaitu adanya kegagalan sistemik dalam mencapai target strategis pengurangan dan penanganan sampah. Terdapat jurang yang signifikan antara amanat kebijakan nasional (Jakstranas) dan daerah (Renstra DLH, Peta Jalan) dengan realita kinerja di lapangan, yang dibuktikan oleh rendahnya capaian angka pengurangan dan penanganan sampah.

Analisis mendalam yang telah dilakukan menunjukkan bahwa akar dari permasalahan ini bukanlah sekadar kekurangan sarana prasarana, melainkan bersumber dari **kelemahan fungsional dan fragmentasi kelembagaan di sektor hulu**. Bank Sampah dan TPST-3R, yang seharusnya menjadi pilar utama dalam strategi pengurangan sampah di sumber, terbukti belum berfungsi secara optimal dan sinergis. Keduanya berjalan sebagai entitas yang terisolasi, menyebabkan rantai nilai ekonomi sirkular terputus dan potensi besar dari 80% sampah yang dapat diolah kembali terbuang menjadi beban di TPA.

Berdasarkan analisis SWOT, posisi strategis Kabupaten Nagan Raya saat ini berada pada **Kuadran Turnaround (Weaknesses-Opportunities)**. Posisi ini mengimplikasikan bahwa meskipun sistem internal sangat lemah, terdapat peluang eksternal yang sangat besar—berupa dukungan kebijakan nasional, potensi pasar daur ulang, dan peluang kemitraan—yang dapat dimanfaatkan secara proaktif untuk melakukan perbaikan fundamental dari dalam. Oleh karena itu, strategi yang paling logis dan mendesak adalah melakukan "putar haluan" dengan fokus pada pembenahan sistemik.

Maka dari itu, kajian ini sampai pada satu kesimpulan utama: untuk mengakselerasi pencapaian target pengelolaan sampah, Kabupaten Nagan Raya tidak bisa lagi mengandalkan pendekatan parsial atau tambal sulam. Diperlukan sebuah intervensi kebijakan yang berani dan transformatif.

Kebijakan yang direkomendasikan adalah **penerbitan Peraturan Bupati (Perbup) tentang Penyelenggaraan Ekosistem Ekonomi Sirkular Sampah Berbasis Komunitas**. Kebijakan ini dipilih karena merupakan instrumen yang paling efektif untuk:

1. **Mengintegrasikan Sistem:** Secara hukum mengikat dan mendefinisikan peran serta alur kerja sinergis antara rumah tangga, Bank Sampah Unit (BSU), Bank Sampah Induk/BUMG Bersama, dan TPST-3R.
2. **Menciptakan Nilai Ekonomi:** Mengubah paradigma dari pengelolaan sampah sebagai pusat biaya (*cost center*) menjadi pusat penciptaan nilai (*value creation center*) dengan memfasilitasi model bisnis yang berkelanjutan.
3. **Memberdayakan Aktor Lokal:** Memberikan landasan hukum bagi penggunaan Dana Desa dan alokasi APBK untuk mendukung pemberdayaan masyarakat sebagai aktor utama dalam ekosistem ini.

Implementasi kebijakan ini akan menjadi langkah strategis yang tidak hanya menyelesaikan masalah sampah secara efektif dan efisien, tetapi juga membuka peluang ekonomi baru, meningkatkan partisipasi publik, dan pada akhirnya membangun model pembangunan daerah yang lebih berketahanan dan berkelanjutan. Ini adalah sebuah peta jalan untuk mengubah tantangan menjadi peluang, dan beban menjadi berkah bagi seluruh masyarakat Kabupaten Nagan Raya.

DAFTAR PUSTAKA

Pemerintah Kabupaten Nagan Raya. (2022). Rencana Strategis (Renstra) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Nagan Raya Tahun 2023-2026. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Nagan Raya.

Pemerintah Kabupaten Nagan Raya. (2025a). Peta Jalan (Roadmap) Rencana Aksi Akselerasi Penuntasan Pengelolaan Sampah Tahun 2025-2026. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Nagan Raya.

Pemerintah Kabupaten Nagan Raya. (2025b). Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2024. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Nagan Raya.

- Pemerintah Republik Indonesia.** (2008). *Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah.*
- Pemerintah Republik Indonesia.** (2014). *Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.*
- Pemerintah Republik Indonesia.** (2017). *Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.*
- Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.** (2021). *Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 14 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Sampah pada Bank Sampah.*
- Adiputra, I. G. N. A., & Purnomo, E. P.** (2022). *Community participation model in waste management based on 3R in Denpasar City.* *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 25(3), 235-250. <https://doi.org/10.22146/jsp.64732>
- Ansell, C., & Gash, A.** (2008). *Collaborative governance in theory and practice.* *Journal of Public Administration Research and Theory*, 18(4), 543–571. <https://doi.org/10.1093/jopart/mum032>
- Astuti, W., & Lestari, P.** (2022). *The effectiveness of waste bank programs in reducing plastic waste in urban areas: A case study in Yogyakarta.* *Sustaina: Jurnal Manajemen Lingkungan*, 6(1), 45-58.
- Chen, X., & Lin, C.** (2021). *A review on circular economy: An alternative for sustainable development.* *Journal of Cleaner Production*, 298, 126769. <https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2021.126769>
- Dewi, S. K., & Kholiq, A.** (2021). *The synergy between waste bank and TPST 3R: A strategy for upstream waste management.* *Indonesian Journal of Urban and Environmental Technology*, 4(2), 115-128. <https://doi.org/10.25105/ijuet.v4i2.8901>
- Dunn, W. N.** (2018). *Public Policy Analysis: An Integrated Approach (6th ed.).* Routledge.
- Fauzi, A. R., & Rozi, F.** (2020). *The role of local government in empowering waste bank as a social enterprise.* *Jurnal Pemerintahan dan Kebijakan*, 11(2), 89-102.
- Firmansyah, H., Setyowati, D. L., & Puspita, L.** (2020). *The failure of the 'collect-transport-dispose' paradigm in Indonesian municipal waste management.* *Journal of Public Affairs*, 20(4), e2108. <https://doi.org/10.1002/pa.2108>
- Handoko, W., & Puspita, A.** (2021). *Operational and financial constraints of 3R waste treatment facilities (TPST-3R) in Bantul Regency.* *Jurnal Presipitasi: Media Komunikasi dan Pengembangan Teknik Lingkungan*, 18(2), 224-233. <https://doi.org/10.14710/presipitasi.18.2.224-233>
- Julianti, F., & Puspitasari, F.** (2021). *Developing a synergy model between waste banks and 3R waste processing sites for an effective circular economy.* *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science*, 724(1), 012045. <https://doi.org/10.1088/1755-1315/724/1/012045>
- Kurniawan, T. A., Othman, M. H. D., & Lestari, W.** (2021). *A holistic review of the challenges and prospects of integrated solid waste management in Indonesia.* *Journal of Adlya (Jurnal Ilmu Hukum dan Pemerintahan)* Vol. 1, No.1, 2025 | 32

- Environmental Management*, 296, 113175. <https://doi.org/10.1016/j.jenvman.2021.113175>
- Manurung, R., & Situmorang, J.** (2022). *Waste bank as a social entrepreneurship model for community empowerment*. *Jurnal Pemberdayaan Masyarakat: Media Pemikiran dan Dakwah Pembangunan*, 6(1), 145-162. <https://doi.org/10.15408/jpm.v6i1.24567>
- Maryono, & Adiatma, D.** (2020). *Technical evaluation of the operation of TPST-3R in Semarang City*. *E3S Web of Conferences*, 202, 03005. <https://doi.org/10.1051/e3sconf/202020203005>
- Permana, A. S., & Hidayat, K.** (2021). *Economic sustainability challenges of community-based waste banks in Indonesia*. *GEOMATE Journal*, 20(77), 144-151. <https://doi.org/10.21660/2021.77.6358>
- Putra, H. P., & Mulyana, N.** (2021). *From linear to circular: The paradigm shift in Indonesia's national development planning*. *Jurnal Perencanaan Pembangunan: The Indonesian Journal of Development Planning*, 5(2), 177-194. <https://doi.org/10.36574/jpp.v5i2.174>
- Raharjo, S., Matsumoto, T., Ihsan, T., & Rachman, I.** (2021). *Municipal solid waste management in Indonesia: A review of challenges and solutions*. *Journal of Material Cycles and Waste Management*, 23(3), 843-856. <https://doi.org/10.1007/s10163-021-01189-y>
- Setiawan, B., & Jayanti, D. S.** (2023). *The role of continuous education in shaping pro-environmental behavior for household waste management*. *Jurnal Pendidikan Lingkungan dan Pembangunan Berkelanjutan*, 24(1), 1-14.
- Wahyuni, D., & Ritonga, H.** (2023). *Circular economy as a new approach for sustainable waste management in Indonesia*. *Journal of Sustainability Science and Management*, 18(3), 112-127.
- Wulandari, D., & Hartono, D. M.** (2023). *The role of waste banks in promoting community participation in waste management in Depok, Indonesia*. *City, Environment and Architecture*, 2(1), 23-31. <https://doi.org/10.22146/cea.2123>